

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAROS MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product of
Maros Regency
by Expenditure*

2017-2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAROS MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product of
Maros Regency
by Expenditure*

2017 - 2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MAROS
MENURUT PENGELUARAN 2017-2021**

**GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT OF
MAROS REGENCY
BY EXPENDITURE 2017-2021**

ISSN:

No. Publikasi: 73080.2203

Katalog: 7313021.7308

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: vii+53 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover oleh:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Sumber Gambar:

google.com

Penerbit:

BPS Kabupaten Maros

Pencetak:

BPS Kabupaten Maros

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Penanggungjawab Umum:

Guruh Wahyu Martopo

Penyunting:

Andi Dewi

Penulis:

Anindya Deshinta Dila

Pengolah Data:

Anindya Deshinta Dila

<https://mapstrib.bps.go.id>

<https://maroskab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maros menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Maros. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Maros secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2017-2021 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Ucapan yang sama disampaikan kepada Dinas/Instansi Pemerintah di Kabupaten Maros, serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Maros, April 2022
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAROS
KEPALA,

Guruh Wahyu Martopo

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	10
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT)	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5 Perubahan Inventori (PI)	20
2.6 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAROS MENURUT PDRB PENGELUARAN	24
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	25
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	34
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	34
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	36
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	37
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	40
3.2.5 Perubahan Inventori	41
3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	42
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	46
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	26
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	28
Tabel 3.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Maros, 2017-2021	30
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Kabupaten Maros, 2017-2021	32
Tabel 5.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros, 2017-2021	35
Tabel 6.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRRT Kabupaten Maros, 2017-2021	36
Tabel 7.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kabupaten Maros, 2017-2021	38
Tabel 8.	Perkembangan PMTB Kabupaten Maros, 2017-2021	40
Tabel 9.	Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Maros, 2017-2021	41
Tabel 10.	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Maros, 2017-2021	42

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	27
Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	29
Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Kabupaten Maros, 2017-2021	29
Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Maros, 2017-2021	31
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Maros, 2017-2021	33

<https://maroskab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	47
Lampiran 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	48
Lampiran 3.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	49
Lampiran 4.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	50
Lampiran 5.	Laju Indeks Harga Implisit PDRB menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021	51

<https://maroskab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **“output akhir (final output)”**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://maroskab.bps.go.id>

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} &= \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} \\ &+ \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ &\text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://maroskab.bps.go.id>

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

<https://maroskab.bps.go.id>

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku}}{\text{IHPB (t)}} - \frac{\text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku}}{\text{IHPB (t-1)}}$

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAROS
MENURUT PDRB PENGELUARAN
2017 -2021**

<https://maroskab.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Maros sebagai akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan nasional dan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Maros sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

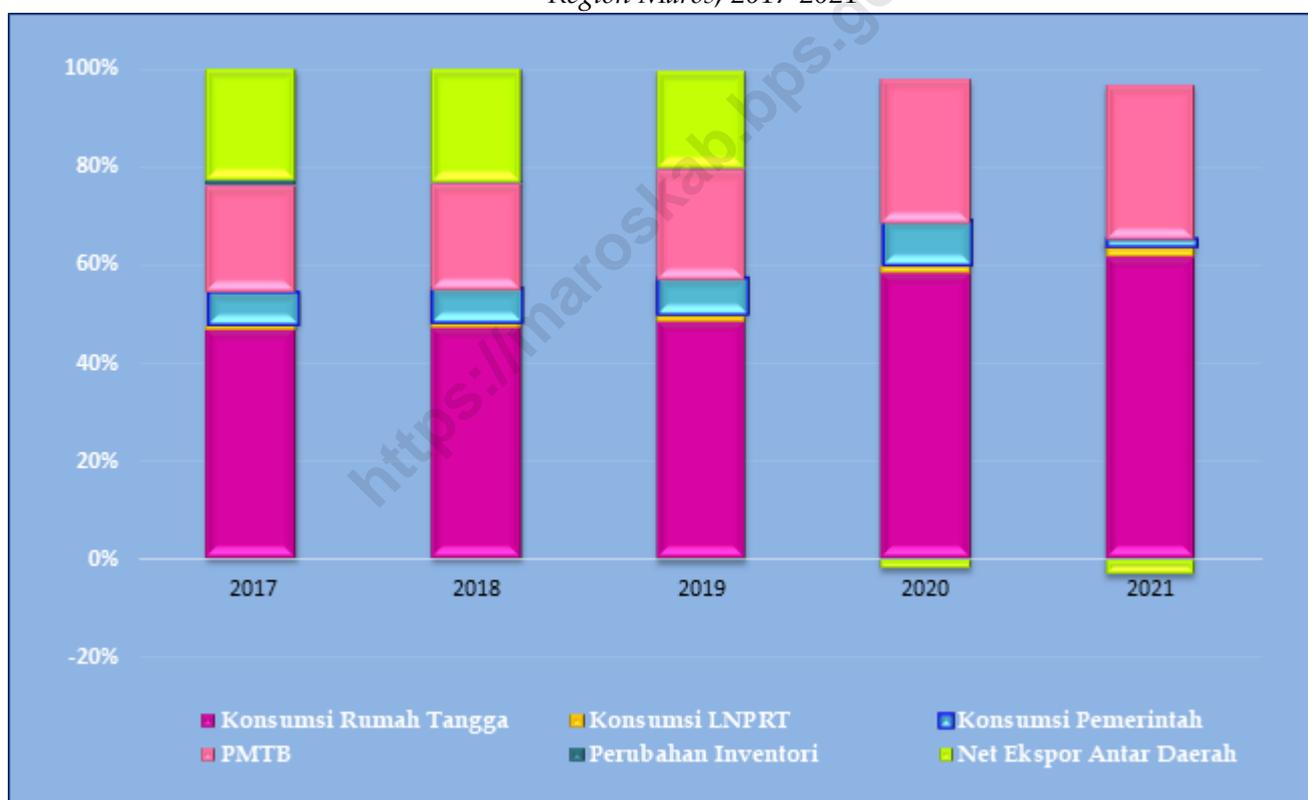
Secara total, PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku di tahun 2021 naik sebesar 2,07 persen, yakni dari 18,62 triliun rupiah (2010=100) menjadi 19,005 triliun rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatannya, yakni dari 12,23 triliun rupiah (2010=100) menjadi 12,4 triliun rupiah (2010=100), atau naik sebesar 1,36 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, perekonomian Kabupaten Maros periode 2017 - 2019 tumbuh secara positif walaupun cenderung mengalami perlambatan pada setiap tahunnya, yakni sebesar 6,81 persen, 6,19 persen dan 1,24 persen. Sementara pada tahun 2020, adanya Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Kabupaten Maros menurun cukup tajam hingga dua digit, yakni sebesar -10,87 persen. Penurunan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Kemudian, perekonomian Kabupaten Maros meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,36 persen.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2017-2021, PDRB Kabupaten Maros sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 31,13 persen. Komponen lain yang cukup besar kontribusinya yaitu Net Ekspor. Komponen ini berkontribusi pada 20 s.d 24 persen selama 2016-2019 dan menurun hingga (1,80) persen di tahun 2020 dan (2,88) persen di tahun 2021. Net ekspor merupakan hasil dari nilai ekspor dikurangi nilai impor. Pada tabel 1 komponen net ekspor bernilai negatif, sementara pada tabel 2, komponen net ekspor bernilai positif yang berarti bahwa secara nominal ekspor lebih kecil dari impor namun secara riil nilainya lebih besar dari pada nilai impor.

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021

Chart 4. Distribution of GRDP at Current Prices by Expenditure, Region Maros, 2017-2021



Catatan: *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami peningkatan dan berada pada rentang 6 - 9 persen selama tahun 2017-2020. Kemudian, kontribusi komponen pemerintah (PK-P) menurun menjadi 1,73 persen pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2017-2019 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen net ekspor yang bernilai positif, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode

tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan. Namun, komponen net ekspor bernilai negatif pada tahun 2020 dan 2021.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros

Table 4. Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region Maros

2017-2021

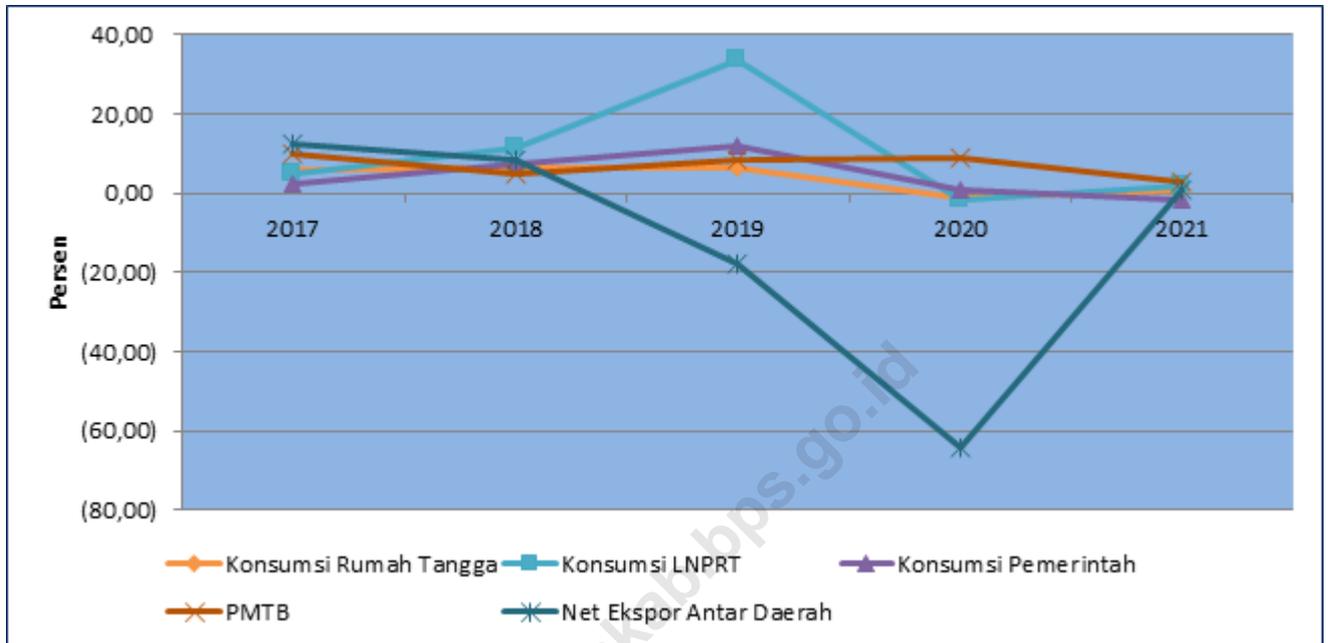
(Persen/Percent)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure</i> <i>item</i>	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household</i> <i>Consumption</i>	5,83	6,21	6,37	-1,20	0,88
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH</i> <i>Consumption</i>	4,85	11,21	33,72	-1,67	1,66
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government</i> <i>Consumption</i>	2,23	7,40	11,78	0,70	-1,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	9,76	4,84	8,22	8,74	2,91
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of</i> <i>Inventary</i>	-	-	-	-	-
6. Ekspor/ <i>Export</i>	-	-	-	-	-
PDRB / <i>GRDP</i>	6,81	6,19	1,24	-10,87	1,36

Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros cenderung melambat, yakni sebesar 6,81 persen (2017); 6,19 persen (2018); 1,24 persen (2019); -10,87 persen (2020); dan 1,36 persen (2021). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, 2017-2021

Chart 5. Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Prices by Expenditure, Region Maros, 2017-2021



Catatan: *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Maros untuk periode 2017 - 2021.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Maros, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Maros maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017 - 2021, secara nominal (atas dasar harga berlaku) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan. Namun, secara riil (atas dasar harga konstan) mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Tabel 5. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros, 2017-2021
Table 5. Trend of Using on Final Household Consumption, Region Maros, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Juta Rp/Million Rp)	9.127.519,1 6	10.110.908,93	11.131.281,28	11.356.947,80	11.643.886, 57
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Juta Rp/Million Rp)	5.980.663,6 0	6.352.307,22	6.757.212,02	6.676.055,1	6.735.113,8
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	46,95	47,44	49,00	60,99	61,27
Rata-rata Konsumsi per Kapita / Average of per-capita consumption					
a. ADHB / Current Prices (Juta Rp/Million Rp)	26,35	28,9	31,52	29,11	29,34
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Juta Rp/Million Rp)	17,27	18,16	19,14	17,11	16,97
Pertumbuhan/Growth[1]					
a. Total konsumsi RT/ Total of Household Consumption	5,83	6,21	6,37	-1,20	0,88
b. Perkapita/Per capita	4,76	5,17	5,38	-10,57	-0,84
Jumlah penduduk/Number of population (orang/person)	346.383	349.822	353.121	390.129	396.924

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)
 *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2017 – 2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuasi, 46,95 persen (2017); naik menjadi 47,44 persen (2018); kembali naik 49 persen (2019); mencapai menjadi 60,99 persen (2020); dan meningkat menjadi 61,27 persen (2021). Fluktuasi tersebut seiring dengan fluktuasi beberapa komponen PDRB pengeluaran yang lain.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, total konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku pada periode 2017-2021. Namun, total konsumsi rumah tangga menurut atas dasar harga konstan tahun 2010 terjadi penurunan pada tahun 2020. Kemudian, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Pada tahun 2017, setiap penduduk di Kabupaten Maros rata-rata menghabiskan dana sekitar 26,35 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 28,9 juta rupiah (2018); 31,52 juta rupiah (2019); 29,11 juta rupiah (2020); dan 29,34 juta rupiah (2021). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 4 dan 5 persen pada periode 2017-2019. Angka tersebut selanjutnya turun menjadi minus 10,57 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi sebesar minus 0,84 persen pada tahun 2021. Pandemi COVID-19 mengakibatkan sebagian penduduk mengalami penurunan pendapatan yang selanjutnya berdampak pada penurunan pengeluaran rumahtangga.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Maros Tahun 2017-2021

Table 6. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure , Region Maros, 2017-2021

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)		
Total Konsumsi LNPRT/Total of NPISH Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Juta Rp/Million Rp)	197.019,99	229.011,98	317.130,88	31 8.604,76	328.550,00
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Juta Rp/Million Rp)	133.593,47	148.575,79	198.674,18	195.362,23	198.603,64
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP					

(% ADHB / Current Prices)	1,01	1,07	1,40	1,71	1,73
Pertumbuhan/Growth (ADHK 2010/Constant Prices 2010)	0,37	0,39	0,42	0,56	0,55

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2016-2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT sebesar 179,25 milyar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya 197,02 milyar rupiah (2017); 229,01 milyar rupiah (2018); 317,13 milyar rupiah (2019); dan 319,66 milyar rupiah (2020). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut 6,92 persen (2016); 4,85 persen (2017); 11,21 persen (2018); 33,72 persen (2019); dan -1,34 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena adanya peningkatan produktivitas Lembaga Non Profit (LNP) khususnya partai politik dengan adanya pesta demokrasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

**Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah,
Kabupaten Maros, 2017-2021**
*Table 7. Trend of Government Final Consumption Expenditure,
Region Maros, 2017-2021*

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah/Total of Government Consumption					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Juta Rp/Million Rp)	1.304.628,7 5	1.451.171,7 6	1.650.263,6 4	1.693.693,4 1	1.687.119,29
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant</i> <i>Prices</i> (Juta Rp/Million Rp)	887.122,18	952.726,32	1.064.986,41	1.072.466,56	1.052.016,77
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP					
(% ADHB / <i>Current Prices</i>)	6,71	6,81	7,26	9,10	1,73
Konsumsi Pemerintah per Kapita Government per-capita Consumption					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Juta Rp/Million Rp)	3,77	4,15	4,67	4,34	4,25
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Juta Rp/Million Rp)	2,56	2,72	3,02	2,75	2,65
Pertumbuhan/Growth[1]					
a. Total konsumsi pemerintah/ <i>Total of Government Consumption</i>	2,23	7,40	11,78	0,70	-1,91
b. Konsumsi Perkapita/ <i>Per capita</i>	1,20	6,34	10,74	-8,85	-3,59
Jumlah penduduk/Number of population (orang/person)	346.383	349.822	353.121	390.129	396.924

Keterangan:

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2017-2020. Sedangkan, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2021, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2017, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1,30 triliun rupiah pada tahun 2017, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1,45 triliun rupiah (2018); 1,65 triliun rupiah (2019); 1,69 triliun rupiah (2020); dan 1,687 triliun rupiah (2021). Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah

dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap total PDRB Maros juga mengalami fluktuasi, dari 6,71 persen (2017), hingga mencapai 1,73 persen (2021). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 1,73 persen, sedangkan proporsi tertinggi dicapai pada tahun 2020. sebesar 9,10 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan pada tahun 2017-2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita pada tahun 2017-2019, sedangkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 3,77 juta rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 4,15 juta rupiah (2018); 4,67 juta rupiah (2019); 4,34 juta rupiah (2020) dan mencapai 4,25 juta rupiah pada tahun 2021. Sedangkan, rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010, masing-masing senilai 2,56 juta rupiah (2017); 2,72 juta rupiah (2018); 3,02 juta rupiah (2019); 2,75 juta rupiah (2020) dan 2,65 juta rupiah (2021).

Rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya, dengan masing-masing tahun senilai 1,20 persen (2017); 6,34 persen (2018); 10,74 persen (2019); -8,85 persen (2020) dan -3,59 persen (2021). Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2017 - 2021 berfluktuasi dari 9,76 persen (2017) menjadi 2,91 persen (2021). Sementara di tahun lainnya masing-masing 4,84 persen (2018); 8,22 persen (2019); dan 8,74 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 selama lima tahun terakhir. PDRB pada komponen ini menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun secara riil. Melambatnya pertumbuhan PMTB ini tidak berarti bahwa iklim investasi sedang lesu. Namun, karena pembangunan telah berjalan sekian lama dan telah terbentuk berbagai aset hasil investasi, maka kebutuhan untuk peningkatan investasi pada kelompok tertentu tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMTB ini berkembang sesuai dengan pola kebutuhan pembangunan. Terjadinya pertumbuhan PMTB tertinggi yakni pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya penambahan nilai aset perusahaan maupun pemerintah. Selain itu, dipengaruhi juga oleh adanya usaha-usaha baru yang menambah nilai PMTB.

Tabel 8. Perkembangan PMTB Kabupaten Maros, 2017-2021

Table 8. Trend of GFCF Region Maros, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB/Total of GFCF					
a. ADHB / Current Prices (Juta Rp/Million Rp)	4.282.022,37	4.558.035,65	5.066.845,13	5.642.398,92	5.915.601,35
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Juta Rp/Million Rp)	2.740.000,69	2.872.512,45	3.108.603,20	3.380.145,29	3.478.430,35

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	22,03	21,39	22,30	30,30	31,13
Pertumbuhan/Growth (ADHK 2010/Constant Prices 2010)	9,76	4,84	8,22	8,74	2,91

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 9. Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Maros, 2017-2021

Table 9. Trend of Changes in Inventories, Region Maros, 2017-2021

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori/Total of Changes in Inventories					
a. ADHB / Current Prices (Juta Rp/Million Rp)	120.439,40	64.601,14	(48.760,77)	(55.264,05)	(21.991,92)
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Juta Rp/Million Rp)	80.542,28	44.216,12	(25.197,07)	(28.303,72)	(11.089,11)
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	0,62	0,30	-0,21	-0,30	-0,12

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2017 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 120.439,40, juta rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 64.601,14 juta rupiah. Nilai perubahan inventori ini terus menurun hingga tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar (48.760,77) juta rupiah menjadi (55.264,05) juta rupiah pada tahun 2020 dan menjadi (21.991,92) juta rupiah pada tahun 2021. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Maros mengalami penurunan pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, proporsi perubahan inventori adalah 0,62 persen, selanjutnya 0,30 persen (2018); (0,21) persen (2019); (0,30) persen tahun 2020 dan meningkat menjadi (0,12) persen tahun 2021. Proporsi perubahan inventori tertinggi terjadi pada tahun 2017. Besaran nilai dari komponen ini dipengaruhi oleh stok persediaan perusahaan manufaktur, pertanian, dan lapangan usaha yang menghasilkan stok.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Maros, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 10. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Maros Tahun 2017-2021

Table 10. Trend of Net Export, Region Maros, 2017-2021

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)		
Total Nilai Ekspor/Total of Export					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Juta Rp/Million Rp)	4.408.385,05	4.897.602,63	4.601.214,36	(335.343,09)	(547.553,82)
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Juta Rp/Million Rp)	2.946.396,18	3.188.400,16	2.622.003,93	937.933,39	947.541,14
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / <i>Current Prices</i>)	22,68	22,98	20,25	-1,80	-2,88

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara umum, dalam kurun waktu 2017 dan 2018 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2019-2021 terjadi penurunan nilai net ekspor. Pada tahun 2017 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar 4,4 triliun rupiah, meningkat menjadi 4,9 triliun rupiah pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 nilainya turun menjadi 4,60 triliun rupiah, menjadi (335,3) milyar rupiah tahun 2020, dan menjadi (547,5) milyar rupiah tahun 2021.

Nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 2,95 triliun rupiah (2017); 3,19 triliun rupiah (2018); kemudian turun menjadi 2,6 triliun rupiah (2019); dan kembali turun menjadi 937,9 milyar rupiah (2020). Kemudian, nilai net ekspor barang dan jasa menurut harga konstan tahun 2010 meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 947,54 milyar rupiah. Sementara itu, pada periode 2017 s.d 2021, proporsi dalam PDRB berfluktuasi pada angka (2,88) hingga 22,68 persen. Akibat pandemi COVID-19, proporsi net ekspor turun menjadi (2,88) persen pada tahun 2021. Proporsi atau kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 22,98 persen.

<https://maroskab.bps.go.id>

BAB IV
PENUTUP

Penutup

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2017 s.d 2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Maros pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017 s.d 2021, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, yakni net ekspor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Maros terhadap ekonomi luar daerah.

<https://maroskab.bps.go.id>

LAMPIRAN

**Lampiran 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran,
Kabupaten Maros Tahun 2017-2021**

GRDP at Current Price by Expenditure, Region Maros, 2017-2021

(Juta Rp/ Million Rp)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Households Consumption Expenditure</i>	9.127.519,16	10.110.908,93	11.131.281,28	11.356.947,80	11.356.947,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ <i>NPISHs Consumption Expenditure</i>	197.019,99	229.011,98	317.130,88	318.604,76	328.550,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.304.628,75	1.451.171,76	1.650.263,64	1.693.693,41	1.687.119,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	4.282.022,37	4.558.035,65	5.066.845,13	5.642.398,92	5.915.601,35
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes in Inventories</i>	120.439,40	64.601,14	(48.760,77)	(55.264,05)	(21.991,92)
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / <i>Net Exports of Goods and Services</i>	4.408.385,05	4.897.602,63	4.601.214,36	(335.343,09)	(547.553,82)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ <i>GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT</i>	19.440.014,7	21.311.332,1	22.717.974,5	18.621.037,7	19.005.611,5

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran,
Kabupaten Maros Tahun 2017-2021**

GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region Maros, 2017-2021

(Juta Rp/ Million Rp)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Households Consumption Expenditure	5.980.663,60	6.352.307,22	6.757.212,02	6.676.055,12	6.735.113,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISHs Consumption Expenditure	133.593,47	148.575,79	198.674,18	195.362,23	198.603,64
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	887.122,18	952.726,32	1.064.986,41	1.072.466,56	1.052.016,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2.740.000,69	2.872.512,45	3.108.603,20	3.380.145,29	3.478.430,35
5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	80.542,28	44.216,12	(25.197,07)	(28.303,72)	(11.089,11)
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	2.946.396,18	3.188.400,16	2.622.003,93	937.933,39	947.541,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT	12.768.318,40	13.558.738,06	13.726.282,66	12.233.658,86	12.400.616,58

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran,
Kabupaten Maros Tahun 2017-2021**

Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region Maros, 2017-2021

(Persen/ Percent)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Households Consumption Expenditure	5,83	6,21	6,37	-1,20	0,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISHs Consumption Expenditure	4,85	11,21	33,72	-1,67	1,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	2,23	7,40	11,78	0,70	-1,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	9,76	4,84	8,22	8,74	2,91
5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT	6,81	6,19	1,24	-10,87	1,36

* Angka sementara / Preliminary Figures

** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

**Lampiran 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran,
Kabupaten Maros Tahun 2017-2021**

Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Region Maros, 2017-2021

(Persen/ Percent)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Households Consumption Expenditure	46,95	47,44	49,00	60,99	61,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISHs Consumption Expenditure	1,01	1,07	1,40	1,71	1,73
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	6,71	6,81	7,26	9,10	1,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	22,03	21,39	22,30	30,30	31,13
5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	0,62	0,30	-0,21	-0,30	-0,12
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	22,68	22,98	20,25	-1,80	-2,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara / Preliminary Figures

** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

**Lampiran 5. Laju Indeks Harga Implisit PDRB menurut Pengeluaran,
Kabupaten Maros Tahun 2017-2021**

Growth Rate of Implicit Price Index of GRDP by Expenditure, Region Maros, 2017-2021

(Persen/ Percent)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Households Consumption Expenditure	4,24	4,29	3,49	3,27	1,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISHs Consumption Expenditure	4,82	4,52	3,56	2,17	1,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	3,06	3,57	1,73	1,92	1,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	5,11	1,54	2,72	2,41	1,88
5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT	1,90	3,24	5,30	-8,03	0,69

* Angka sementara / Preliminary Figures

** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

<https://maroskab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten the Nation* —

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten the Nation* —